

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI IV
JULI 2016

KAJIAN LUAR NEGERI (KAJILU)

KEMAJUAN SINGAPURA DALAM ASPEK EKONOMI

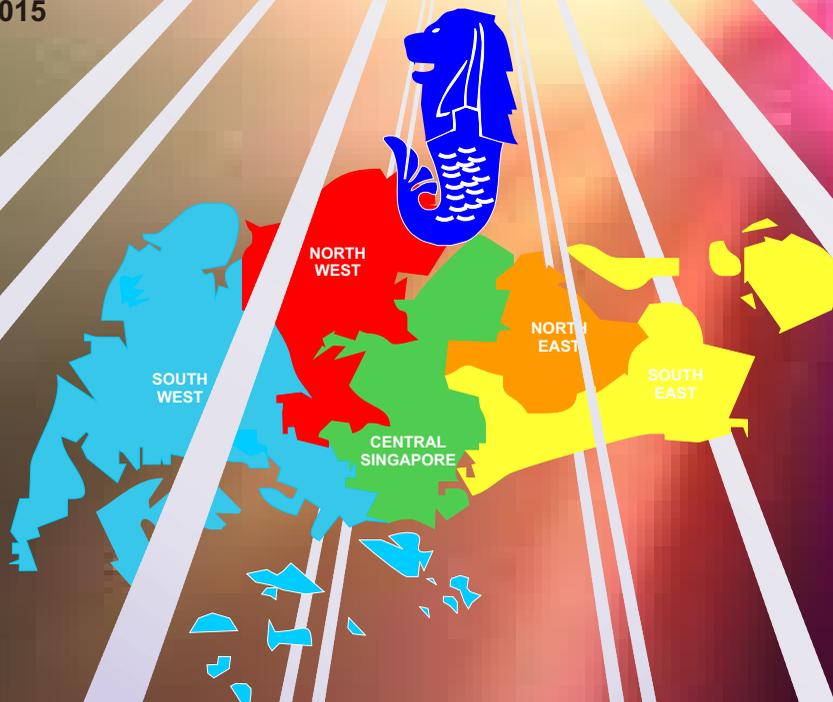


DILEMA PARTAI POLITIK
MENGHADAPI PILKADA

JALAN PANJANG MENUJU
KENAIKAN TUNJANGAN KINERJA
SETJEN WANTANNAS
TAHUN 2015

KEDAULATAN INDONESIA
DI NATUNA DAN
LAUT CHINA SELATAN

APARATUR SIPIL NEGARA
YANG PROFESIONAL



Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh, setelah melewati bulan penuh ampunan dan rahmat maka saatnya kita untuk melanjutkan kegiatan yang menjadi kewajiban kita dimasing-masing posisi dan bidangnya. Pertama-tama kami ucapkan **SELAMAT HARI ULANG TAHUN Bhayangkara ke 70**, selamat ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia semoga menjadi garda terdepan dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Majalah Catra Edisi IV bulan Juli 2016 menyajikan laporan khusus Kajian Luar Negeri (kajilu) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke negara Singapura. Kajilu merupakan salah satu kegiatan yang kerap diselenggarakan oleh Setjen Wantannas dalam rangka memenuhi tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga yang bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kajilu Setjen Wantannas diselenggarakan sebagai perwujudan kebijakan negara dalam rangka menjalin interaksi dengan negara luar. Menjadi penting untuk diketahui bahwa dalam Kajilu perlu memahami apa yang dilakukan oleh negara lain agar dapat mengadaptasikan dan mengaplikasikan kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif merupakan cerminan dari kepentingan nasional yang hendak dicapai. Sehingga menjadi hal yang tak terelakkan bahwa Kajilu Setjen Wantannas dianggap sebagai alat interaksi negara dalam melakukan politik internasional.

Selain itu, Kajilu diselenggarakan sebagai kajian tersendiri yang memiliki berbagai elemen pembahasan seperti adanya keterkaitan antara Pemimpin negara dengan keputusan kebijakan luar negeri yang dibuat. Pada dasarnya, kebijakan luar negeri suatu negara juga tercermin dari kepentingan Pemimpin negara tersebut. Hasil dari Kajilu Setjen Wantannas di negara Singapura akan menjadi salah satu bahan rekomendasi bagi Presiden sebagai Ketua Wantannas dalam menentukan arah ketahanan nasional kita.

Jakarta, Juli 2016

Redaksi



Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 Dilema Partai Politik Menghadapi Pilkada



- 6 Kedaulatan Indonesia di Natuna dan Laut China Selatan

TAJUK UTAMA



- 9 KAJILU Wantannas
"Kemajuan Singapura dalam Aspek Ekonomi"

PROFIL



- 13 Laksda TNI Ir. Eko Djarmo Asmadi, MH.
Jenderal Sederhana dari Ambarawa

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 14 Jalan Panjang Menuju Kenaikan
Tunjangan Kinerja Setjen Wantannas

INFO KITA



APARATUR SIPIL NEGARA

- 16 Aparatur Sipil Negara yang Profesional

Inspirasi Bulan Ini

"Kisah Keledai"

Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur. Hewan itu menangis memilukan selama berjam-jam sementara si petani memikirkan apa yang harus dilakukannya.

Akhirnya si petani memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun atau ditutup karena berbahaya. Jadi tidak berguna menolong si keledai. Kemudian ia mengajak tetangganya untuk membantu. Mereka membawa sekop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia menangis penuh kengerian.

Tetapi kemudian semua orang takjub karena si keledai menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah lagi dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si keledai melakukan sesuatu yang menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu.

Sementara itu, si petani dan tetangganya terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Namun si keledai terus juga mengguncangkan badannya dan melangkah naik. Segera saja semua orang terpesona ketika si keledai meloncati tepi sumur dan melarikan diri.

Mungkin kehidupan ini terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepadamu dengan segala macam jenisnya. Cara untuk keluar dari "sumur" (kesedihan, masalah, dll) adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran dari diri kita (yang ada dalam pikiran dan hati kita) dan melangkah naik untuk keluar dari "sumur" dengan menggunakan hal-hal positif sebagai pijakan. Yakinlah bahwa setiap masalah atau ujian bukanlah beban, tapi jadikanlah sebagai batu pijakan untuk melangkah dan melompat ke tingkat yang lebih tinggi.

Percayalah, bahwa kita dapat keluar dari "sumur" yang terdalam dengan terus berjuang dan pantang menyerah.

Desi Fajar Nita

DILEMA PARTAI POLITIK MENGHADAPI PILKADA



Gambar oleh : Google

Oleh: Brigjen Pol Drs. Iwan Hari Sugiarto

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) tidak mengatur secara rinci pengisian jabatan Kepala Daerah, sementara untuk pengisian jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD sudah ditekankan UUD 1945 harus melalui Partai Politik. Dualisme pelaksanaan pasal 18 ayat (4) UUD ini, menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan rentan menimbulkan diskriminasi sehingga melanggar pasal 28 UUD 1945. Diskriminasi dalam tafsiran MK tentang UU Pemda terlalu memaksakan pada konsep persamaan hak dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan (3). Sehingga pada tahun 2007 melalui keputusan MK mengabulkan pengujian atas UU No 32 Tahun 2004, bahwa ruang yang sama bagi calon lain di luar partai politik dalam pemilihan kepala daerah adalah konstitusional. Sejak saat itu, warga negara yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada memiliki dua alternatif, bisa melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik, dan jalur non partai atau perseorangan.

Dilema adalah situasi sulit yang mengharus-

kan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, dan apa yang dimaksud dilema partai politik dalam menghadapi Pilkada, calon perseorangan meningkat dan kaderisasi partai politik terhadap calon kepala daerah sangat minim dan bahkan banyak kader-kader partai politik yang sudah mapan sebagai anggota DPR/DPRD harus mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.

CALON JALUR PERSEORANGAN

Sejak disepakatinya bahwa calon kepala daerah dapat dilakukan tanpa melalui jalur partai atau yang lebih dikenal dengan jalur perseorangan maka Pilkada serentak tahun 2015 ada kecenderungan tren peserta Pilkada dari jalur perseorangan meningkat yaitu 35 % dan sebanyak 14 % diantaranya berhasil memenangkan Pilkada tersebut. Gejala tersebut tentu menjadi tantangan bagi partai politik yang semakin dihadapkan pada tuntutan kaderisasi dan demokratisasi internal.

Dibalik pengaturan baru calon perseorangan (revisi UU No 8 Tahun 2015) di mana untuk calon perseorangan untuk dukungan dari masyarakat bagi calon jalur perseorangan perlu dilakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi oleh KPU maupun verifikasi faktual oleh petugas PPS dan apabila calon tidak dapat menghadirkan pendukung dalam verifikasi faktual tersebut maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hasil survei salah satu lembaga survei mengatakan bahwa verifikasi faktual ini di khawatirkan akan menjegal perjalanan bagi calon perseorangan atau sulit lolos dalam tahap administrasi dikarenakan akan memakan waktu dan membutuhkan tenaga checker yang cukup banyak.

KOALISI PARTAI POLITIK

Proses pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada serentak yang digelar pada Desember 2015 diwarnai dengan koalisi cair antarpapol pengusung di daerah. Papol berkoalisi secara acak tanpa harus tersekat pemetaan antara papol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Acaknya koalisi memperlihatkan pengusungan calon kepala daerah tidak mempersoalkan visi, *platform*, ideologi papol, atau kandidat. Akan tetapi lebih bertemu pada sudut kepentingan jangka pendek, yaitu memenangkan kandidat tertentu dan memperoleh kekuasaan. Berkoalisi selain merupakan salah satu pilihan politik juga bisa dimaksudkan sebagai siasat. Berkoalisi dan memiliki modal politik yang besar bisa jadi dirasa akan lebih ringan dibandingkan jika harus bertanding sendirian. Namun, koalisi papol di Pilkada ini juga bisa memunculkan sejumlah kekhawatiran partai mengalami krisis kader untuk berlaga di Pilkada. Salah satu sumber potensial kader partai untuk Pilkada adalah anggota DPR dan DPRD, tetapi mereka harus mundur jika

menjadi calon kepala daerah. Padahal anggota DPR atau DPRD dianggap sebagai kader partai yang siap dari sisi modal jaringan dan terutama dana, belum lagi kekuatan relawan yang terorganisir potensial menjadi tantangan bagi konsolidasi partai-partai politik, hal ini terbukti hingga pertengahan tahun 2016 partai-partai besar di Jakarta masih sibuk menjaring bakal calon untuk Pilkada 2017 mendatang.

Partai Politik merupakan pilar demokrasi dan sumber rekrutmen kader, sehingga dilema partai politik dalam Pilkada ada 2 (dua) hal yaitu munculnya calon dari jalur perseorangan yang telah memiliki elektabilitas cukup tinggi dengan didukung kekuatan relawan yang terorganisir dan kurangnya kader dari papol sebagai calon kepala daerah sehingga partai politik untuk mengimbangi kekuatan calon independen harus melakukan koalisi antara partai politik dalam pengusungan calon dengan melihat elektabilitas masing-masing calon yang diusung dari partai politik. Walaupun dalam berkoalisi harus ada partai politik yang harus mengalah. Sedangkan contoh lain adanya partai politik (Nasdem, Hanura dan Golkar) mendukung calon dari independen (Basuki Tjahaja Purnama /Ahok) untuk Pilkada di DKI Jakarta, walaupun ini dapat dikatakan mengaburkan makna kontestasi yang ada (dalam kontestasi jelas diatur bahwa partai yang memenuhi ambang batas atau gabungan partai politik dalam pengusung pasangan calon kepala daerah dapat berkoalisi/bergabung). Bentuk-bentuk di atas tersebut merupakan dilema dari partai politik dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung, maka partai politik perlu strategi dalam menghadapi dilema dimaksud, sehingga nantinya Pilkada diharapkan tidak hanya menjadi sebatas ajang pertarungan elit politik baik nasional maupun lokal, lebih lanjut Pilkada merupakan upaya mewujudkan pemerintah daerah yang berintegritas, efektif dan menyejahterakan masyarakat.****



Gambar oleh : Google



KEDAULATAN INDONESIA DI NATUNA DAN LAUT CINA SELATAN

Keputusan mahkamah arbitrase PBB di Den Haag yang menyebut Cina tak memiliki dasar hukum untuk mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan langsung direspon Beijing. Kementerian Luar Negeri Cina, pada Selasa (12/7/2016) mengatakan, pemerintah Cina tidak menerima dan tidak akan mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional itu.

"Keputusan itu tak memiliki kekuatan yang mengikat. Cina tidak akan menerima atau mengakui keputusan tersebut," demikian pernyataan Kemenlu Cina. "Beijing tidak akan menerima berbagai upaya pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang dipaksakan terhadap Cina," tambah Kemenlu Cina sambil menegaskan posisinya dalam sengketa wilayah itu.

Sebelumnya, Cina sudah berulang kali menolak otorita Mahkamah Arbitrase terkait sengketa wilayah strategis itu dengan Filipina. Cina mengklaim, keputusan pengadilan internasional adalah ilegal dan bias dalam masalah sengketa di Laut Cina Selatan ini.

Lalu dimanakah posisi Indonesia dalam klaim Laut Cina Selatan yang telah dimulai sejak tahun 1953? Pemerintah Cina mengeluarkan wilayah Teluk Tonkin dari peta "Eleven-dash Line" buatan Kuomintang. Kemudian Komunis Cina "menyederhanakan" peta itu dengan mengubahnya menjadi "Nine-dash Line" yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir

semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi itu.

Celakanya, klaim Cina itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara tetangga di kawasan tersebut. Kini negara-negara seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia berebut wilayah tersebut dengan Cina.

KEPULAUAN NATUNA

Secara Geografis Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan yaitu Pulau Natuna. Dahulu Kabupaten Natuna adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Natuna awalnya terkenal sebagai wilayah Pulau Tujuh yang merupakan gabungan dari tujuh kecamatan kepulauan yang tersebar di Perairan Laut Cina Selatan yaitu Jemaja, Siantan, Midai, Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan, dan Tambelan. Enam kecamatan kecuali Tambelan nantinya menjadi cikal bakal wilayah Kabupaten Natuna.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia Nomor 9/Deprt tanggal 18 Mei 1956 yang isinya menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia. Batas wilayah Natuna terdiri dari sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan, sebelah

Barat dengan Semenanjung Malaysia, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km², lautan 262.197,07 km², dan Ranai ditetapkan sebagai Ibukota Natuna.

Di kabupaten ini terdapat 154 pulau, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan sebagian besar pulau (127 buah) tidak berpenghuni. Dua pulau terbesar diantaranya adalah Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Pulau-pulau yang ada dapat dikelompokkan dalam 2 gugusan yaitu (1) Gugusan Pulau Natuna, terdiri dari pulau-pulau di Bunguran, Sedanau, Midai, Pulau Laut, dan Pulau Tiga; (2) Gugusan Pulau Serasan, terdiri dari pulau-pulau di Serasan, Subi Besar dan Subi Kecil.

POTENSI PULAU NATUNA

Membicarakan Natuna akan terpikir sebuah kabupaten yang terdiri dari ribuan pulau terletak di ujung utara Indonesia dengan jarak lebih dari 1.250 km dari Jakarta.

Selain banyak pantai dan pulau yang masih "perawan", Natuna juga super kaya dengan kandungan gas maupun minyak bumi. Terasa tak lengkap jika membicarakan Natuna tanpa kandungan alam gas alam yang disebutkan oleh para ahli, memiliki cadangan gas terbesar di dunia yaitu Blok Natuna D-Alpha yang merupakan blok

gas dan minyak yang menyimpan sekitar 500 juta barel. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik, dan inilah cadangan terbesar di dunia yang tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Potensi gas yang *recoverable* sebesar 46 tcf (46,000 bcf) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf). Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata minyak US\$ 75/barel selama periode eksploitasi, nilai potensi ekonomi gas Natuna adalah US\$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25 triliun (kurs US\$/Rp = Rp 10.000). Bandingkan dengan APBN 2010 yang hanya Rp 1.047,7 triliun. (*Data diambil dari : premier oil - GBR*).

Natuna merupakan simbol kedaulatan sekaligus bagian NKRI yang menyimpan segudang potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang demikian melimpah. Kepulauan yang berada di sekitar garis batas Indonesia dengan sejumlah negara yakni Malaysia, Vietnam, dan Kamboja menyimpan setidaknya 16 blok migas.

Blok-blok migas yang ada di sekitar wilayah Kepulauan Natuna itu, kini 5 blok di antaranya sudah menjalankan produksinya sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi, ditambah lagi potensi perikanan yang luar biasa bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti merencanakan membangun Sentra Kelautan dan Perikanan di Natuna.

Indonesia adalah *non-claimant states* atau negara yang tidak menuntut klaim atas Laut Cina Selatan



Gambar oleh : Google

PERTAHANAN DAN KEAMANAN DI NATUNA

Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Cina Selatan memiliki arti yang strategis bagi Bangsa Indonesia. Walaupun Indonesia bukan negara yang ikut menuntut klaim atas kepemilikan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, namun posisi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil Indonesia menjadi penting bagi kelanjutan Konflik Laut Tiongkok Selatan. Setidaknya ada 4 alasan yang menjadikan wilayah Laut Tiongkok Selatan penting bagi Indonesia. Pertama, perairan merupakan soko guru bagi aktivitas ekspor impor Indonesia. Kedua, konflik dan instabilitas di Laut Tiongkok Selatan akan berdampak pada perdagangan dan ekonomi kawasan. Ketiga, kawasan tersebut juga merupakan jalur masuk ke wilayah Indonesia dari utara dan keempat, kawasan utara merupakan alur yang disepakati Indonesia sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

merupakan sebuah kewajiban bagi negara yaitu dengan tujuan menjaga kedaulatan negara serta martabat sebuah bangsa.

Pembangunan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau, menjadi prioritas pemerintah menyusul ketegangan yang terjadi di perairan kawasan itu antara Indonesia dengan Cina. Pemerintah RI segera “membentengi” Natuna yang berhadapan dengan wilayah sengketa Laut Cina Selatan dari kemungkinan “dicaplok” negara lain.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan anggaran pertahanan yang diterima kementeriannya dan TNI saat ini sebagian diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna. Sementara sisa anggaran digunakan untuk perbaikan Alat Utama Sistem Pertahanan (ALUTSISTA) seperti penggantian suku cadang dan mesin peralatan perang.

Pangkalan militer di Natuna akan dilengkapi tiga kapal perang TNI Angkatan Laut, kapal selam, satu pesawat tempur, radar, dan *drone* penangkis se



Gambar oleh : Google

Konflik Laut Tiongkok Selatan ini mengandung dua dimensi, yakni dimensi hukum yang berkaitan dengan kedaulatan; dan dimensi politik yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan Indonesia adalah *non-claimant states*, atau negara yang tidak menuntut klaim atas Laut Cina Selatan. Indonesia juga memiliki hubungan baik dengan seluruh negara yang terlibat sebagai *claimant states*, juga Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga menjadi target persuasi oleh Tiongkok maupun negara-negara lainnya.

Namun demikian, membangun sistem pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan

Rangan udara. Pelabuhan di Natuna juga akan diperbaiki, sedangkan landasan pacunya diperlebar untuk tempat mendarat pesawat tempur. Dari segi penguatan personel, Ryamizard akan menambah satu kompi marinir dan satu kompi Korps Pasukan Khas (Korpaskhas) TNI Angkatan Udara. Satu kompi Korpaskhas terdiri dari 150 sampai 200 personel. Satuan ini memiliki kemampuan tempur darat, laut, dan udara sekaligus. Sementara TNI Angkatan Darat di Natuna akan dilengkapi dengan satu Batalyon Raider yang merupakan salah satu pasukan elite Tentara Nasional Indonesia. **** (diolah dari berbagai sumber oleh : Desi)

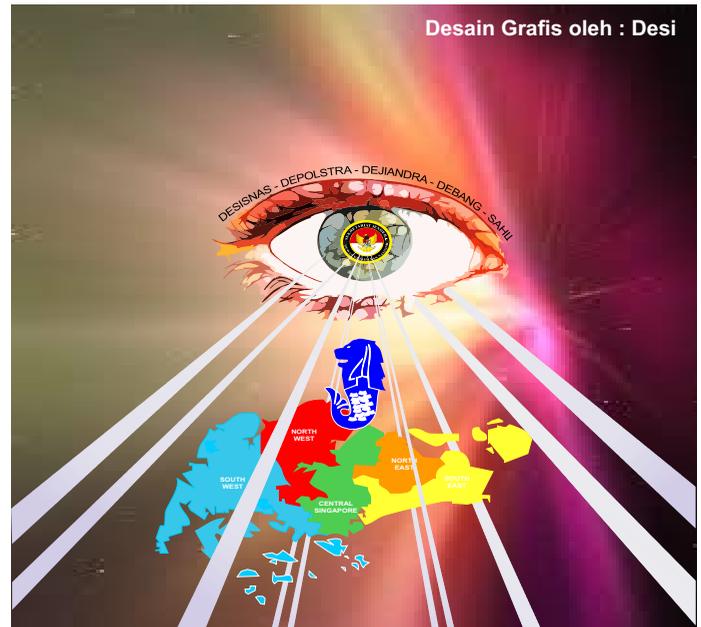
KAJIAN LUAR NEGERI (KAJILU) KEMAJUAN SINGAPURA DALAM ASPEK EKONOMI

Oleh: Brigjen TNI Toto Siswanto, S.IP, MM.

LATAR BELAKANG

Pemerintahan Indonesia yang sepanjang sejarahnya telah mengalami berbagai perubahan sistem dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, dengan segala kekurangan dan kelebihan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sampai saat ini, bisa dikatakan bahwa Indonesia sudah mampu meraih capaian yang cukup signifikan di bidang ekonomi, meskipun dalam banyak hal masih memerlukan kerja yang lebih keras lagi untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama. Pemerintahan sekarang dengan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo - seperti halnya pimpinan nasional yang terdahulu - tentu memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan amanahnya membangun Indonesia bersama-sama seluruh komponen bangsa. Pembangunan di bidang ekonomi masih merupakan salah satu prioritas yang tengah diperjuangkan oleh pemerintah dalam melanjutkan keberhasilan yang telah diraih.

Pada sisi lain, Singapura sebagai negara yang secara geografis sangat berdekatan dengan Indonesia, telah menjadi negara yang terkemuka dalam kemajuan di bidang ekonominya sehingga menjadi salah satu pusat perekonomian internasional. Berbagai negara termasuk Indonesia mempunyai hubungan dan kerjasama bidang ekonomi dengan Singapura. Bahkan dalam beberapa hal, bisa dikatakan bahwa sebagian aktivitas ekonomi Indonesia masih mengalami ketergantungan pada sistem yang berlaku di Singapura. Singapura juga menempati urutan teratas dalam menanamkan investasinya di Indonesia, yakni sebesar USD 5,9 miliar pada tahun 2015. Pengelolaan sektor-sektor ekonomi yang diterapkan di Singapura dengan segala faktor yang mendukungnya, terbukti telah menjadikan Singapura memiliki keunggulan ekonomi, tidak saja



Desain Grafis oleh : Desi

pada lingkup regional, tetapi juga pada lingkup global. Adalah tepat jika Singapura dijadikan sebagai salah satu model untuk dikaji kelebihan dalam pengelolaan sektor-sektor ekonomi.

Oleh karena itu, program Kajian Luar Negeri (Kajilu) yang dilakukan oleh Setjen Wantannas bisa menjadi media yang efektif untuk memperoleh bahan masukan dan sekaligus merumuskannya menjadi sumbangan pemikiran.

PELAKSANAAN PROGRAM KAJILU KE SINGAPURA

Program Kajilu ke Singapura dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 dengan fokus kajian pada aspek ekonomi kiranya dapat dinilai telah memperoleh masukan yang berharga.

Tahap pertama pada tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016, tim dari Kedeputusan Polstra yang terdiri atas Irjen Pol Drs. Tjetjep Agus S, M.M., M.H., Deputi Politik dan Strategi Setjen Wantannas dan Kolonel Lek Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, S.T., M.T., Analis Kebijakan Rencana Kontinjensi Ekonomi, Kedeputusan Politik dan Strategi Setjen Wantannas. Obyek kunjungan meliputi *Ministry of Foreign Affairs*

(MFA), *National Security Coordination Secretariat* (NSCS), *Cyber Security Agency* (CSA), *Ministry of Defence* (MINDEF).

Tahap kedua pada tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016, tim dari Kedepuitan Pengembangan terdiri atas Marsda TNI Sugihardjo, SE, MM, Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantannas dan Brigjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si, Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan Kedepuitan Pengembangan Setjen Wantannas. Obyek peninjauan adalah Bandara Changi Singapura.

Tahap ketiga pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016, tim dari Staf Ahli terdiri atas Irjen Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas; Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng Staf Ahli Bidang Iptek Setjen Wantannas; Dr. Mohammad Ghazalie, Staf Ahli Bidang Hukum Setjen Wantannas. Obyek kunjungan adalah Kantor

pai dengan tanggal 13 Mei 2016 tim Kedepuitan Sistem Nasional terdiri atas Mayjen TNI Dr. Drs. Tahan SL. Toruan, MM., D.SS, Deputi Bidang Sistem Nasional Setjen Wantannas dan Brigjen TNI Agus Suharto, S.IP.,MM Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara Kedepuitan Sistem Nasional Setjen Wantannas dengan obyek kunjungan Kantor Perwakilan RI di Singapura.

HASIL YANG DIPEROLEH SELAMA KUNJUNGAN

Kemajuan di bidang ekonomi yang sangat pesat dapat dicapai oleh Singapura karena dukungan berbagai faktor di luar aspek perekonomian. Sinergi dari kerja keras pada semua aspek kehidupan telah mampu menciptakan situasi dan kondisi yang sangat kondusif bagi tumbuh pesatnya perekonomian Singapura. Ditambah lagi tata pemerintahan yang berfungsi dengan baik, ting-



Gambar oleh : Google

Perwakilan RI di Singapura dan peninjauan lapangan.

Tahap keempat pada tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 tim dari Kedepuitan Jiandra terdiri atas Laksda TNI Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas; Laksma TNI Eko Purwanto Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategi Nasional Kedepuitan Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas; dan Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM Kepala Biro Umum Setjen Wantannas. Obyek kunjungan meliputi *Port of Singapore Authority* (PSA) International Pte Ltd sebagai perusahaan pemegang otoritas pengelola pelabuhan di Singapura dan Pelabuhan Jurong (Jurong Port) yang dikelola Jurong Port Pte Ltd.

Tahap kelima pada tanggal 11 Mei 2016 sam-

kat kedisiplinan rakyat serta sistem hukum yang berjalan efektif, semakin mendorong lajunya pembangunan ekonomi Singapura

Pertumbuhan ekonomi Singapura melebihi perkiraan di kuartal terakhir tahun 2015 ketika kenaikan sektor jasa mengimbangi penurunan sektor manufaktur dan ekspor. *Gross domestic product* (GDP) tumbuh 6,2 persen di periode tiga bulanan berakhir Desember 2015, dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh 2,3%. Sektor jasa telah mendorong ekonomi Singapura di saat situasi perlambatan ekonomi Cina yang menjadi tujuan ekspor terbesarnya.

GDP kuartal pertama tidak tumbuh lebih dari kuartal sebelumnya pada *Seasonally Adjusted Annualized Rate* (SAAR), menggambarkan kinerja erlemah dalam tiga kuartal pada perkiraan 14 April 2016. Angka itu jauh di bawah kenaikan 6,2% yang

diperkirakan di kuartal empat dan sedikit dibawah pertumbuhan 0,2% dari yang diharapkan pasar.

Pertumbuhan di kuartal pertama flat adalah karena kontraksi di sektor jasa mengimbangi pertumbuhan di sejumlah sektor. Layanan sangat membebani hasil keseluruhan, berayun dari pertumbuhan 7.7% menurun menjadi 3,8%. Sektor konstruksi meningkat dari peningkatan 6,0% naik menjadi 10,2%. Manufaktur tumbuh luar biasa 18,2% yang mewakili *rebound* yang kuat, namun sangat dipengaruhi oleh peningkatan sementara produksi farmasi pada bulan Januari 2016.

Dalam hal *year-on-year*, GDP tumbuh 1,8% di kuartal pertama tahun 2016. Secara keseluruhan, ekonomi Singapura tumbuh sebesar 2,0% pada tahun 2015, yang lebih rendah dari 2014 sebesar 3,3%. Anggaran Tahun 2016 merupakan kombinasi beban fiskal dan pertumbuhan dengan asumsi moderat. Pemerintah Singapura menargetkan surplus fiskal sebesar 0,8% dari GDP pada 2016 dan tetap melakukan serangkaian langkah-langkah untuk mendukung perusahaan dan individu seperti menaikkan pajak penghasilan badan dan memperkenalkan hibah untuk semua anak Singapura. Dengan ekspansi 7,3% total pengeluaran pemerintah langkah-langkah untuk merangsang produktivitas jangka panjang serta untuk melawan siklus "*headwinds*"

PENGELOLAAN PELABUHAN DAN BANDARA

Pelabuhan Singapura

Pelabuhan Singapura (*Port of Singapore*) terletak pada posisi yang strategis berada pada perlintasan perdagangan dunia (*crossroads of world trade*), dan sejak dulu dimanfaatkan oleh Inggris sebagai pusat logistik di kawasan Asia Tenggara. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara, Pelabuhan Singapura berkembang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia setelah pelabuhan Shanghai dan Ningbo-Zhoushan di China, yang mampu mengelola lebih dari 500 juta kargo setiap tahunnya (bandingkan dengan *Jakarta International Container Terminal/JICT* Tanjung Priok yang total volume peti kemas 5-6 juta per tahun). Terminal-terminal Pelabuhan Singapura tersebut berlokasi di Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Pasir Panjang, Sembawang, dan Jurong. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menjadi tempat singgah sekitar 140 ribu kapal angkutan barang setiap tahunnya dan mampu menghubungkan lebih dari 600 pelabuhan di dunia. Pelabuhan-pelabuhan di Singapura dikelola oleh PSA yang merupakan suatu perusahaan pemegang otoritas pengelola pelabuhan di Singapura. Saat ini PSA mengoperasikan 5 terminal peti kemas yaitu



Gambar oleh : Google



Tanjong Pagar Terminal, Keppel Terminal, Brani Terminal, Pasir Panjang Terminal 1 dan 2, Pasir Panjang Phase 3 dan 4. Kelima terminal tersebut dikelola langsung oleh PSA International Pte Ltd dengan tiga perusahaan utama yang berada di bawahnya yaitu PSA Singapore Terminals, PSA HNN, dan PSA Marine. Secara total, perusahaan tersebut mengoperasikan 28 pelabuhan di 16 negara Asia, Eropa, dan Amerika. Saat ini, PSA memposisikan diri sebagai *transshipment port* (hub port) sebesar 85% dan sisanya merupakan pelayanan pelabuhan untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura. PSA menyediakan pelayanan *maritime* dan *shipping*, termasuk pelayanan *pilotage*, *port and terminal towage*, *ocean transportation*, *support vessels for the offshore oil & gas industry*, *heavy-lift*, *oil spill response and salvage services*.

Bandara Changi Singapura

Bandara Changi merupakan bandara tersibuk ke-26 di dunia dan ke-6 di Asia diukur dari kepadatan penumpang. Memiliki 2 Runway masing-masing Runway barat panjang 4000 M dan Ranway timur panjang 2748 M dengan luas lahan yang digunakan 1300 Ha. Transportasi dalam Bandara menggunakan *sky train* gratis, sebuah sistem transportasi bus/kereta gratis yang beroperasi dari pukul 06.00 sampai dengan pukul 01.30 dini hari. Perjalanan memakan waktu tidak lebih dari 1 1/2 menit atau bus beroperasi selama 24 jam.

Memiliki 3 Terminal yang kesemuanya akan

Melayani penerbangan dari Singapura ke seluruh dunia, dengan volume penumpang pada Tahun 2014 sebanyak 54.093.070 orang dan Tahun 2015 sebanyak 55.448.964 orang, terjadi peningkatan 2.50 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Bandara Changi sudah berhasil membuat dua terminal baru sedang dalam pengerjaan (reklamasi), yaitu Terminal CIP yang diberi nama Jet Quay (Terminal-4) dan Budget Terminal (Terminal-5). Volume barang yang terangkut pada Tahun 2014 sebanyak 1.843.799 Ton dan pada Tahun 2015 sebanyak 1.853.087 Ton, terjadi peningkatan 0.50 persen.

Volume penerbangan tahun 2014 sebanyak 341.334 Flight dan pada Tahun 2015 sebanyak 346.336 Flight, terjadi peningkatan 1.44 %. (Terdapat 945 Flight/minggu atau setiap 90 detik/Flight). Khusus penerbangan dari Singapura ke Jakarta 37 Flight /hari. Setiap hari staf dan karyawan yang terlibat dalam operasional Bandara Changi 40.000 orang yang merupakan bagian dari 200 Badan atau perusahaan.

Bandara Changi Singapura secara berturut turut meraih 5 kali penghargaan sebagai Bandara Internasional terbaik di dunia, hal ini tercapai karena selain didukung oleh sarana prasarana yang sangat baik juga didukung oleh manajemen pengelolaan kebandarudaraan yang profesional.

Bandara Changi disamping sebagai bandara komersil juga tergabung dengan Pangkalan udara militer, guna mengakomodir penerbangan militer. Otoritas pengelola Bandara Changi telah melakukan pengaturan sbb:

Untuk pesawat tempur menggunakan Runway Timur (*Changi east base*), Satuan ini disiagakan untuk kawasan Laut China Selatan, sedangkan pelaksanaan latihan Pihak AU Singapura diberi Slot Time untuk terbang karena Bandara Changi lebih diprioritaskan untuk penerbangan komersil (kecuali keadaan darurat), hal ini menjadikan jam terbang pilot tempur AU Singapura enjadi terbatas.

Untuk pesawat angkut militer menggunakan Runway barat (*Changi west base*), untuk operasional penerbangannya harus mengantri sesuai urutan dengan penerbangan komersil.

KEMUDAHAN DALAM BERBISNIS

Singapura telah masuk katagori negara maju meskipun termasuk diantara 20 negara yang secara geografis terkecil di dunia, dengan total luas area hanya 682,7 km persegi. Sepanjang 1965 - 2015, pendapatan perkapita Singapura melonjak 100 kali lipat, mencapai USD 55.000 per orang per tahun. Singapura merupakan negara kota yang tidak memiliki modal pembangunan dan tidak memiliki hasil alam.

Singapura berada di peringkat nomor satu di dunia untuk kategori kemudahan melakukan bisnis (*ease doing business*). Sedangkan Indonesia berada di peringkat 114 dengan nilai 59,15 persen. Sementara Indonesia kalah jauh dari Singapura berkaitan dengan kebebasan berbisnis, perdagangan, fiskal, investasi, korupsi, dan tenaga kerja imigran. Singapura berada di peringkat kedua di dunia, setelah Hong Kong, dan peringkat kedua dari 42 negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kebebasan ekonomi dengan nilai rata-rata 89,4. Sementara Indonesia hanya berada di peringkat ke-105 dunia dan peringkat ke-22 dari 42 negara di kawasan Asia Pasifik, sebagai negara memiliki kebebasan ekonomi, dengan nilai rata-rata 58,1.

Singapura merupakan negara strategis dengan menawarkan pelayanan jasa dan sumber daya manusia terlatih, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Singapura juga negara terbaik di Asia Pasifik untuk lingkungan yang ramah bisnis, infrastruktur yang mendukung, memiliki jaringan teknologi tinggi, ramah terhadap tenaga kerja dan perusahaan asing. Singapura pun berada di peringkat pertama untuk tingkat kepadatan perusahaan asing dan kelima di dunia untuk lokasi kantor pusat perusahaan. Bagi investor, Singapura merupakan negara yang paling nyaman di dunia untuk melakukan bisnis. Singapura menyediakan berbagai kondisi nyaman untuk kewirausahaan. Singapura memiliki diversifikasi ekonomi dan diakui sebagai pusat keuangan global. Singapura berkomitmen untuk menarik investasi asing, yang merupakan bagian dari strategi ekonomi nasional. Singapura sangat *welcome* terhadap keahlian asing dan berpenghasilan tinggi ke Singapura. Setiap tahun hak tinggal permanen asing di Singapura setidaknya lima orang. Singapura sangat *welcome* migrasi dari luar negeri, di satu sisi untuk menjaga kemakmuran ekonomi. Singapura adalah untuk dapat berkembang menjadi tempat nyaman bagi enam juta orang di negara ini dengan masyarakat yang lebih beragam untuk tujuan jangka panjang.

Dari Kaji yang dilaksanakan dapat disimpulkan, Kemampuan menjaga kelangsungan hidup Singapura dilandasi semangat "membangun dari ketidak-adaan" dan hal ini yang menjadikan mereka sangat maju dalam investasi sumber daya manusia khususnya di lingkup ASEAN. Pemerintah Singapura sangat konsisten dalam menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Pada umumnya masyarakat mendukung kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini terbukti situasi politik relatif stabil dan berkembang dinamis. Walaupun ada gejolak politik, tetapi masih dalam batas toleransi yang umum terjadi di negara demokrasi.****

**LAKSDA TNI IR. EKO DJALMO ASMADI, MH.
JENDERAL SEDERHANA DARI AMBARAWA**



Laksamana Muda TNI Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH saat ini menjabat sebagai Deputy Bidang Pengkajian dan Penginderaan (Dejiandra) Setjen Wantannas yang dilantik oleh Letjen TNI (Purn) Waris pada 28 November 2012. Dilahirkan di Ambarawa pada 20 Januari 1959, anak pertama dari Ayahanda bernama M. Tondopawiro dan Ibu Hj. Asmini. Menikah dengan Dra. Wuri Handayani dikarunia 2 (dua) orang anak. Alumni Akabri Tahun 1983 merupakan sosok yang sederhana dan banyak bergaul dengan banyak kalangan baik dari kalangan pejabat sipil, pejabat TNI sampai petani dan nelayan.

Pengalamannya setelah lulus Akabri diantaranya sampai tahun 1995 ditempatkan diberbagai kapal perang (KRI) di Armada RI di Kawasan Timur, tahun 1996 dipercaya sebagai Direktur Sekolah Penyelamatan Kapal dan Nuklir Biologi Kimia (Speknubika) di Kodikal Surabaya, tahun 1998-2002 diperbantukan di Kementerian Pertahanan RI, tahun 2003 2006 diangkat sebagai Atase Pertahanan RI di Seoul, Korea Selatan, tahun 2010-2011 diangkat sebagai Kepala Dinas Pengamanan TNI AL dan pada tahun 2011-2013 diangkat sebagai Direktur B Bais TNI.

Kecintaannya pada olahraga sepakbola membuat dia dinobatkan sebagai Dewan Pembina pada sebuah klub sepakbola di Medan yaitu Yayasan Marah Halim.

Selama menjadi Deputy Bid. jandra Setjen Wantannas, Eko Djalmo Asmadi selalu memilih kegiatan peninjauan ke daerah-daerah pantai yang miskin. Keprihatinannya terhadap kehidupan miskin yang terstruktur disana, menggugahnya untuk bergabung dalam Persatuan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Permatani). Di Permatani, selain mengurus bisnis dengan mengumpulkan produk-produk kelautan dan perikanan, juga ikut mengupayakan agar anak-anak usia sekolah disana bisa mendapat pendidikan layak seperti anak-anak yang lain.

Menjelang Purna Tugas TMT 1 Februari 2017, Perwira Tinggi ini menaruh harapan kepada Wantannas supaya bisa lebih berkualitas dalam memberikan aspirasinya kepada Presiden.

“Wantannas dengan segala fasilitas yang lebih dari cukup sekarang ini, sedapat mungkin hasil kerja Wantannas lebih berkualitas karena sudah didukung dengan peralatan dan sarana yang mumpuni,” ujar dia.

“Sekarang kita mendapatkan data cukup mudah, bisa mengakses dari IMM kita, tersedia juga sarana media cetak, akses internet juga terbuka luas dan tidak ada batasan, sehingga dalam mengambil data harus yang berkualitas, jangan dari satu sumber saja. Sehingga kalau diawaki oleh personel yang berkualitas dengan pemikiran-pemikiran yang positif dari personel yang ingin membangun dan menjaga ketahanan nasional Indonesia, saya yakin Wantannas akan berkualitas hasil pemikiran dan sumbangannya kepada Ketua Dewan”, jelasnya pada Tim Majalah Catra pada Selasa (12/07/2016).

Penerima Bintang Yudha Dharma Pratama ini juga berpendapat bahwa Media Center di Wantannas cukup Sesjen saja. Sedangkan Sekretariat Jenderal sendiri tidak perlu tampil. Sekretariat Jenderal tugasnya mensupport kebutuhan dari Sekretaris Jenderal guna memenuhi kebutuhan substansi maupun non substansi dari bidang pemikiran Wantannas yang dalam hal ini diketuai oleh Presiden.**** (sesuai hasil wawancara oleh : Desi Fajar Nita).

DATA DIRI

- **NAMA** : Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH.
- **PANGKAT/CORPS** : Laksamana Muda TNI
- **JABATAN** : Deputy Bid. Pengkajian dan Penginderaan
- **KESATUAN** : Setjen Wantannas
- **TMT ABRI** : 1 Februari 1983
- **TEMPAT TANGGAL LAHIR** : Ambarawa, 20-01-1959
- **SUKU BANGSA** : Jawa
- **AGAMA** : Islam
- **PENDIDIKAN** : Strata 2 Hukum Tahun 2012
- **NAMA ISTRI** : Dra. Wuri Handayani
- **JUMLAH ANAK** : 2 (dua) orang
- **KECAKAPAN BAHASA** :
Inggris : aktif
- **PENUGASAN LUAR NEGERI** :
 1. Singapura Tahun 1983 dan 1985
 2. Thailand Tahun 1983
 3. Malaysia Tahun 1985, 1988, 1992, 1997
 4. Australia Tahun 2000
 5. Perancis Tahun 2001
 6. Belanda Tahun 2001
- **RIWAYAT JABATAN** :
 1. KODIKAL/PUSDITEK/SPEKNUBIKA/DIR
 2. DEPHANKAM/DITJEN MATFASJAS/DITFASJAS/SI FASJASHUB/KA
 3. DEPHANKAM/DITJEN MATFASJAS/DIT ADA/SUBDIT/ADADAGRIS/SI LAKKA
 4. DEPHAN/DITJEN RANAHAN/DIT ADA/SUBDIT ADADAGRI/SI SI SIAP/KA
 5. MABESAL/DISMATAL/SUBDIS TEKNOKAP/KA
 6. KOARMABAR/SAHLI PANG 'B' KOMSOS
 7. MABES TNI/BAIS TNI/DIT "B"/PABAN UTAMA B-5
 8. MABES TNI/BAIS TNI/ATHAN RI/DI SEOUL/KORSEL
 9. MABES TNI/PAMEN
 10. MABESAL/DISADAL/SUBDIS ADALU/KA
 11. KOARMABAR/SAHLI PANG "D" JEMEN
 12. MABESAL/SPAM KASAL/BAN IV HUBLUPA
 13. MABESAL/DISPAMAL/KA
 14. MABESAL/STAF KHUSUS KASAL
 15. MABES TNI/BAIS TNI/DIT "B"/DIR
 16. DEJIANDRA SETJEN WANTANNAS



TUNJANGAN KINERJA SETJEN WANTANNAS TAHUN 2015

Hampir 3 (tiga) tahun sejak pertama kali diberlakukannya Perpres Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Setjen Wantannas mendapatkan penyesuaian kenaikan tunjangan kinerja. Penyesuaian kenaikan tersebut diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Terbitnya Perpres Nomor 36 Tahun 2016, ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Biro Keuangan Setjen Wantannas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tertanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Setjen Wantannas.

Pada 10 Juni 2016 terbitlah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, yang selanjutnya Perdirjen Perbendaharaan tersebut sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja dengan besaran nilai yang baru dihitung mulai bulan Mei 2016 yang dibayarkan pada bulan Juni 2016.

Pembayaran kekurangan kenaikan tunjangan kinerja berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2016 dibayarkan dalam bentuk rapel sebanyak 6 (enam) bulan yaitu bulan November dan Desember 2015 serta bulan Januari sampai dengan April 2016. Kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 2015 sebesar 60% adalah buah dari capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Setjen Wantannas yang dikoordinir oleh Tim RB Setjen Wantannas.

Kepastian akan diberikannya kenaikan Tunjangan Kinerja kepada pegawai Setjen Wantannas tahun 2015 diketahui setelah diterimanya tembusan surat Menteri PAN dan RB RI kepada Menteri Keuangan RI Nomor B/3845.I/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 30 November

2015 hal Permohonan Izin Prinsip Tunjangan Kinerja. Atas dasar surat dari Menteri PAN dan RB tersebut pada tanggal 10 Desember 2015 Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI mengirimkan surat undangan dan permintaan data-data terkait jumlah pegawai dan alokasi anggaran Tunjangan Kinerja kepada Sesjen Wantannas sebagaimana tertuang dalam Undangan Rapat Nomor UND-857/AG/2015.

Tanggal 22 Desember 2015, Menteri Keuangan mengirimkan surat kepada Menteri PAN dan RB sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor SR-2497/MK.02/2015 hal Permohonan Penetapan Surat Ijin tentang Pemberian Tunjangan Kinerja dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas yang berisi hal-hal sebagai berikut : (1) Usulan penyesuaian Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional pada prinsipnya dapat disetujui; (2) Besaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana terlampir; (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diberikan terhitung mulai 1 November 2015.

Setelah terbitnya Ijin Prinsip Tunjangan Kinerja dari Menteri Keuangan tersebut diterima, langkah selanjutnya adalah Menteri PAN dan RB mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi Perpres, sebagaimana tertuang dalam surat Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PAN dan RB Nomor R/01/D.I.PAN-RB/01/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Permohonan Harmonisasi. Selanjutnya tanggal 20 Januari 2016 dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Perpres mengenai Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan 8 Kementerian/Lembaga yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait sebagaimana surat undangan dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PPE.3.UM.01.04-19 tanggal 19 Januari 2016 perihal Undang-an Rapat.

Demikian gambaran perjalanan selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan program reformasi birokrasi dengan capaian mendapat kenaikan tunjangan kinerja menjadi 60 persen. Semoga pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas ke depannya menjadi lebih efektif.****



Gambar oleh : Google

**TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

| NO | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | 17 | Rp. 22.842.000,00 |
| 2. | 16 | Rp. 17.413.000,00 |
| 3. | 15 | Rp. 12.518.000,00 |
| 4. | 14 | Rp. 9.600.000,00 |
| 5. | 13 | Rp. 7.293.000,00 |
| 6. | 12 | Rp. 6.045.000,00 |
| 7. | 11 | Rp. 4.519.000,00 |
| 8. | 10 | Rp. 3.952.000,00 |
| 9. | 9 | Rp. 3.348.000,00 |

| NO | KELAS JABATAN | TUNJANGAN KINERJA |
|-----|---------------|-------------------|
| 10. | 8 | Rp. 2.927.000,00 |
| 11. | 7 | Rp. 2.616.000,00 |
| 12. | 6 | Rp. 2.399.000,00 |
| 13. | 5 | Rp. 2.199.000,00 |
| 14. | 4 | Rp. 2.082.000,00 |
| 15. | 3 | Rp. 1.972.000,00 |
| 16. | 2 | Rp. 1.867.000,00 |
| 17. | 1 | Rp. 1.766.000,00 |

APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL



APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh : dr. Riswandi

“Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan profesional ini tidak hanya diartikan sebagai keahlian, termaksud pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan dan pengetahuan dari pendidikan tertentu, tetapi juga harus beretika”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan salah satu tonggak sejarah reformasi birokrasi Indonesia. Terbitnya UU ASN ini menandai perubahan paradigma pegawai ASN dari semula berfokus pada kepatuhan PNS kepada peraturan perundang-undangan dan pemerintah, sekarang lebih difokuskan pada profesionalitas pegawai ASN. Hal ini tercermin dalam UU ASN di mana kata “profesional” dan derivatnya disebutkan setidaknya 14 kali baik dalam di bagian pertimbangan, batang tubuh maupun penjelasan, sedangkan di dalam UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak disebutkan walaupun disebutkan hingga sembilan kali pada UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974.

Pergeseran fokus dari kepatuhan menjadi profesional adalah perubahan yang fundamental. Pada masa orde Baru PNS adalah salah satu elemen penting dalam menjaga hegemoni pemerintah, sehingga pendekatan kepatuhan (PNS) adalah prasyarat stabilitas pemerintahan. Hal ini menimbulkan patronase berlebihan yang berujung pada kentalnya feodalisme dan praktek korupsi, kolusi serta nepotisme dalam birokrasi. Gelombang besar reformasi sejak tahun 1998 telah memecah hegemoni itu, sebagaimana terlihat dari upaya perubahan melalui terbitnya UU 43/1999. Akan tetapi institusi birokrasi Orde Baru yang telah dibangun selama lebih dari 30 tahun bukanlah sesuatu yang mudah untuk digantikan. Nilai-nilai yang terdapat dalam institusi tersebut telah menjadi bagian dalam sistem budaya aparatur Indonesia. Pergantian pucuk pimpinan (Presiden) pada tahun 1998 dan pemilihan Presiden berikutnya pun belum

tentu bisa membawa perubahan. Dalam suatu sistem, elemen-elemen yang membentuknya bersifat saling berkaitan satu sama lain. Menurut Meadow (2009) diperlukan perubahan antar elemen untuk merubah suatu sistem. Perubahan tersebut melibatkan perubahan pada model mental dari sistem tersebut. Kondisi yang sama terjadi pada perubahan orientasi kepatuhan menjadi profesionalitas dalam manajemen ASN.

PROFESIONALITAS ASN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata profesional mempunyai arti 1) bersangkutan dengan profesi 2) memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya. Kata ini merupakan turunan dari kata “profesi” yang dalam KBBI diartikan sebagai “bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu”. Artinya, untuk dapat dikatakan memiliki profesionalitas atau bertindak secara profesional, diperlukan prasyarat antara lain pekerjaan yang dilakukan adalah profesi dan ada standar hasil keluaran dari pekerjaan tersebut. Berkaitan dengan hal di atas, UUN ASN secara tegas menyatakan bahwa ASN adalah sebuah profesi (Pasal 1 angka 1). Sehingga pegawai ASN harus memenuhi prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN, layaknya profesi lainnya seperti dokter, insinyur dan advokat. Keberadaan prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN inilah yang menjadikan orientasi profesionalitas menjadi lebih mendasar dibanding undang-undang sebelumnya. Terkait dengan hasil kerja, secara teknis setiap pegawai ASN mempunyai sasaran kerja yang harus dicapai. Tetapi secara filosofis, ASN sebagai abdi masyarakat dan entitas dari birokrasi dalam setiap peran dan tugasnya harus mampu memberikan Solusi dan kontribusi dalam memberikan pelayanan

ASN adalah sebuah profesi (Pasal 1 angka 1 UU ASN). Sehingga pegawai ASN harus memenuhi prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN, layaknya profesi lainnya seperti Dokter, Insinyur, Advokat dll

Yang terbaik kepada masyarakat guna menyelesaikan berbagai masalah di masyarakat. Aparatur negara sebagai sebuah kekuatan yang terkendali dan terukur serta bebas dari kepentingan diharapkan menampilkan kinerjanya dalam pelayanan kepada masyarakat. Inilah esensi pokok keberadaan aparatur negara dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kinerja sebagai wujud profesionalitas memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan tujuan bernegara dan pembangunan nasional. Tidak ada pelaksanaan perubahan yang tidak melibatkan birokrasi sesuai peran dan tugasnya dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan filosofi dan sifatnya sebagaimana digambarkan di atas, maka profesionalitas bagi seorang pegawai ASN tidak bisa diartikan sebagai keahlian (*expert*), termaksud pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan pekerjaan dan pengetahuan dari pendidikan tertentu, tetapi juga harus beretika moral (*ethical*). Menurut Koven (2015), etika bagi aparatur negara adalah mendukung misi pemerintahan sejauh misi tersebut sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Pegawai yang beretika dapat memilih opsi bersuara (*voice*) lewat mekanisme internal/eksternal atau meninggalkan posisinya (*exit*) apabila pegawai tersebut menemukan bahwa misi yang dijalankan pemerintah telah mencederai nilai-nilai kebenaran. Pegawai ASN yang profesional memiliki legalitas dalam menjalankan profesinya, karena pegawai tersebut diangkat secara formal berdasarkan pertimbangan keahliannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek legalitas tersebut memberikan legitimasi hukum bagi pegawai ASN yang menjadikan profesinya disegani oleh masyarakat. Akan tetapi itu saja tidak cukup karena tujuan pemerintah akhirnya adalah memperoleh kepercayaan masyarakat (*public trust*) dan apresiasi masyarakat. Inilah yang menjadi legitimasi sosial dari profesionalitas ASN. Dengan Legitimasi hukum dan sosial, profesi ASN dapat menjadi sebuah peran yang benar-benar terhormat di mata publik.



ASN Setjen Wantannas rapat membahas persiapan penyelenggaraan HUT KORPRI

MEMBANGUN PROFESIONALITAS PEGAWAI ASN

Karakter *expert* dalam *ethical* dalam profesionalitas bukanlah karakter yang dapat dibentuk dengan mudah, terutama untuk pegawai ASN yang telah terbiasa dengan institusi yang terbangun sejak Orde Baru yaitu pendekatan kepatuhan dan penyimpangan-penyimpangan sistem yang dianggap lazim. Pegawai ASN cenderung enggan untuk mendorong legitimasi sosial dari profesionalitasnya dan hanya mementingkan legitimasi hukum dari jabatan yang diemban. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan paradigma dengan pendekatan kepada dua lapisan pembentuk sistem yaitu institusi dan sumber daya manusia (SDM).

Perubahan dalam tingkat institusi diperlukan identifikasi nilai-nilai yang perlu dipertahankan (*continue*), dikikis (*stop*), dan dibentuk ulang (*start*). Nilai-nilai yang perlu dipertahankan dalam sistem SDM ASN adalah jiwa korsa (*esprit de corps*) dan profesionalitas jabatan. Dipertahankan nilai-nilai ini bukan berarti nilai tersebut tidak perlu diubah sama sekali tetapi nilai-nilai tersebut masih relevan untuk dikembangkan pada masa ini. Sementara itu nilai-nilai yang perlu dikikis antara lain primordialisme, feodalisme, sakralisme, politisasi birokrasi, dan birokrasi berbelit-belit. Selain itu karakter *expert* dan *ethical* dalam profesionalitas membutuhkan independensi setiap pejabat dalam skala tertentu oleh sebab itu dibutuhkan desentralisasi kewenangan. Semua proses diatas diharapkan menghasilkan nilai-nilai baru yaitu universalitas, egaliter, impersonal, netralitas, imparial, dan akuntabilitas. Selain nilai-nilai tersebut, inovasi merupakan nilai baru yang harus ditanamkan dalam kerangka institusional birokrasi.****(Diolah dari berbagai sumber)

TEKNOLOGI PELILINAN BUAH-BUAHAN

Jika anda perhatikan buah-buahan impor yang dipajang di pasar swalayan (supermarket) kelihatan segar dan mengkilap, sebetulnya buah-buahan tersebut didatangkan dari negara asalnya beberapa waktu sebelumnya. Setelah anda beli dan kemudian iseng-iseng kulit buahnya dikikis menggunakan pisau, maka akan keluar serbuk berwarna putih yang akan meleleh kalau dibakar. Ketahuilah, itu merupakan hasil dari teknologi pelilinan (*waxing*) yang dapat mempertahankan buah-buahan selama rentang waktu mulai dari panen, transportasi, penyimpanan, pendistribusian, hingga ke penjualan.

APA ITU TEKNOLOGI PELILINAN BUAH?

Produk pertanian termasuk buah-buahan memiliki karakteristik fisik mudah busuk dan rusak (*perishable*). Setelah dipanen, buah-buahan masih mengalami proses metabolisme berupa respirasi (keluar masuknya oksigen dan karbondioksida) dan transpirasi (proses kehilangan cairan), sehingga kualitasnya akan terus menurun selama penyimpanan. Agar daya tahannya lama, buah-buahan tersebut perlu penanganan khusus seperti penggunaan suhu rendah (pendinginan), modifikasi atmosfer ruang simpan, pemberian bahan kimia secara eksogen, pemberian lapisan yang dapat dimakan (*edible coating*), dan pelilinan.

Teknologi pelilinan sebagai salah satu alternatif memperpanjang daya simpan buah-buahan sebetulnya bukan hal baru karena secara historis sudah ditemukan sejak abad ke 12 dan penyebaran penggunaannya mulai sekitar tahun 1920. Selain memperpanjang daya simpan, teknologi pelilinan ditujukan untuk memperbaiki kulit, mencegah penyusutan, menutup luka atau goresan, mencegah timbulnya jamur, mencegah busuk, dan mempertahankan warna buah-buahan. Oleh karena itu, lilin (*wax*) yang digunakan untuk pelapisan buah-buahan harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya tidak mempengaruhi bau dan rasa, cepat kering, tidak lengket, tidak mudah pecah, mengkilap dan licin, mudah diperoleh, berharga murah, dan yang terpenting adalah tidak mengandung racun.

Sebetulnya setiap buah memproduksi lilin secara alami untuk mempertahankan metabolismenya dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pelilinan berasal dari bahan alami (*non petroleum-based*) seperti: (1) lilin carnauba (*carnauba wax*) dari pohon palem; (2) lilin candellia (*candellia wax*) dari tanaman sejenis euphorbia (tikel balung, bahasa Jawa); (3) shellac (pelapis) jenis *food grade* (layak dikonsumsi) yang terbuat dari serangga; (4) lilin lebah (*cera valva*); (5) lilin tebu; (6) spermaceti (lilin dari ikan paus); dan (7) lilin buah komersial (*semperfresh-functional coating*).

Oleh: Muhammad Iqbal



Gambar oleh : Google

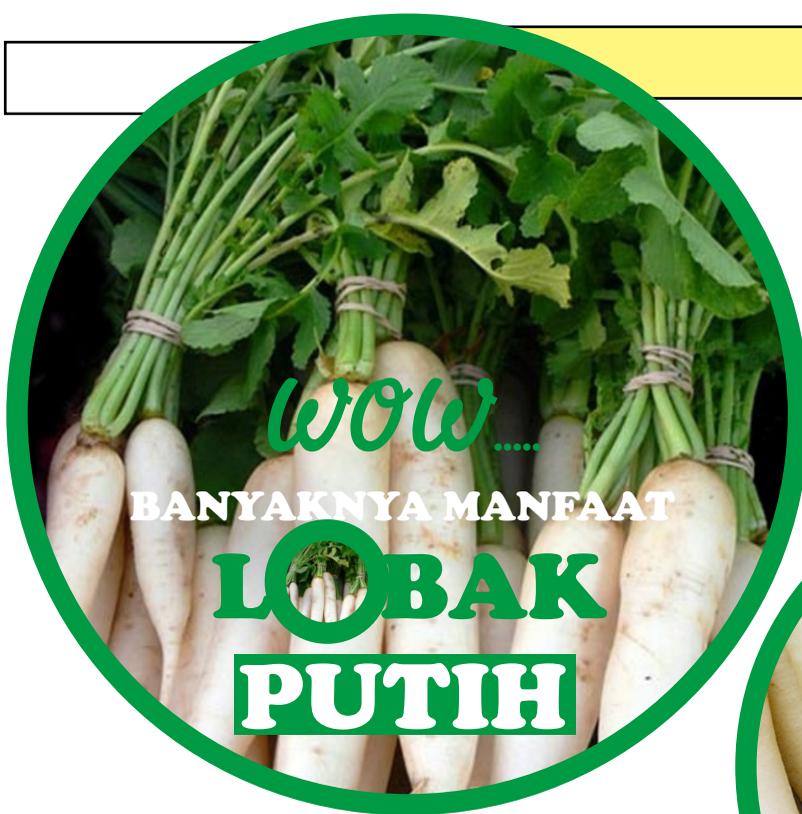
Khusus untuk buah-buahan, teknologi pelilinan umumnya menggunakan lilin lebah yang dibuat dalam bentuk emulsi lilin dengan konsentrasi 4-12 persen.

APAKAH TEKNOLOGI PELILINAN BUAH-BUAHAN AMAN BUAT KONSUMEN?

Ini merupakan pertanyaan yang paling mendasar terkait dengan dampak penggunaan teknologi pelilinan pada buah-buahan. Di negara-negara maju, tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi terhadap hasil teknologi pelilinan pada buah-buahan. Di Amerika Serikat, sebagai contoh, otoritas setempat yaitu *Food and Drug Administration* (FDA) telah mengeluarkan sertifikasi khusus untuk teknologi pelilinan. Lantas, bagaimana dengan negara kita Indonesia?

Teknologi pelilinan termasuk dalam kategori Bahan Tambahan Pangan (BTP) pelapis di Indonesia. Untuk menjamin keamanan dan sekaligus mencegah kecurangan, penggunaan Teknologi pelilinan diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP) seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/Menkes/X/1999 dan Nomor 033/Menkes/VII/2012. Di atas semua itu ada Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang salah satu substansinya menyatakan bahwa kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah aman, bergizi, bermutu, dan dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Tidak usah khawatir dengan teknologi pelilinan, Manfaat buah banyak sekali, diantaranya sebagai anti bodi, sumber vitamin, serat, dan mineral, serta antioksidan yang membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar baik di saat muda maupun di masa tua.



Lobak putih merupakan tanaman umbi-umbian atau sayuran yang sangat baik untuk tubuh dan mudah didapatnya di supermarket atau pasar tradisional. Sayuran ini bermanfaat bagi kesehatan. Sayuran khas tiangkong ini mempunyai manfaat yang banyak untuk tubuh.



Gambar oleh : Google

Oleh: Sabar Riyanto

1. MENCEGAH PENYAKIT LIVER

Lobak putih dapat membantu menjaga kenormalan fungsi dari liver. Hal ini dikarenakan kandungan di dalam lobak putih dapat mendetoksifikasi liver dan juga bermanfaat mengatur empedu dan bilirubin.

2. MENGobati PENYAKIT ASMA

Lobak putih memiliki kandungan anti-inflamasi dan anti oksidan yang dapat membantu mengobati dan mengurangi penyakit asma.

3. MENYEMBUHKAN DEMAM

Lobak putih dapat digunakan untuk meredakan demam dengan cara dijus lalu dicampurkan garam secukupnya dan diminum.

4. MENGHILANGKAN DETOKSIFIKASI/RACUN DALAM TUBUH

Lobak putih merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung air, sehingga sayuran ini sangat baik untuk menghilangkan racun dalam tubuh.

5. MENCEGAH ANEMIA

Lobak putih memiliki kandungan RNA yang berperan dalam pembentukan sel darah merah.

6. EFEKTIF MENGobati JAMUR

Lobak putih mengandung enzim diastase, amylase, mirosinase serta enzim esterases yang dapat berguna untuk membunuh jamur yang pertumbuhannya berlebihan.

7. MENURUNKAN TEKANAN DARAH

Lobak putih memiliki kandungan potasium dan vitamin B yang berperan baik untuk menurunkan atau menstabilkan tekanan darah, memanfaatkannya dengan menjadikan minuman.

8. MENCEGAH PENUAAN DINI

Dengan mengkonsumsi sayur ini secara rutin dapat membantu tubuh memperbaiki sel kulit yang rusak dan terhindar dari penuaan dini.

9. MENURUNKAN BERAT BADAN

Lobak putih merupakan sayuran yang kaya akan serat dan air yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama jadi cocok untuk dijadikan salah satu menu diet.

10. MEMPERKUAT SISTEM KEKEBALAN TUBUH/IMUN

Selain baik untuk mengurangi resiko cacat pada bayi, mengkonsumsi lobak putih bisa memperkuat sistem kekebalan/imun dalam tubuh memiliki kandungan kalium yang membantu fungsi otot dan syaraf.****(sumber : Blogspot.com).

FENOMENA “JEJARING SOSIAL”

Gambar oleh : Google

Oleh: Enang Suhendar

Kemajuan Komputer, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini terus berkembang seiring dengan dinamika dan tuntutan hidup manusia dengan harapan agar bisa memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan bagi penggunanya. Kemajuan TIK yang begitu cepat dalam beberapa dekade ini membuat seolah-olah dunia tidak dibatasi lagi oleh kerangka ruang dan waktu. Betapa evolusi dan perkembangan yang tak terbayangkan sebelumnya bisa terjadi hanya dalam waktu satu dasawarsa lebih. Sementara pada tahun 2002 internet masih cenderung eksklusif dan jadi mainan orang mampu, kini sudah sepertiga penduduk bumi terhubung kedalam jejaring informasi tersebut. Statistik mencatat, jumlah situs web di dunia pada tahun 2002 berjumlah 3 juta situs web, jumlah ini naik 32.900 persen-nya di awal tahun 2016 menjadi 987 juta situs web. Sedangkan jumlah pengakses internet di dunia pada tahun 2002 berjumlah 569 juta atau 9,1 persen dari populasi dunia, dan di awal tahun 2016 pengguna internet dunia berjumlah menjadi 3,3 milyar atau sekira 47% dari populasi penduduk di dunia (<http://www.internetlvestats.com/>). Salah satu pemicu melonjaknya pengguna akses internet di dunia adalah kehadiran jejaring sosial yang seakan-akan mewabah pada setiap pengguna internet. Kehadirannya menimbulkan efek positif dan negatif bagi dua keping mata uang yang kedua sisinya tidak akan dapat dipisahkan.

Seiring dengan globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), membawa pengaruh terhadap tata kehidupan nasional, regional, dan global. Berdasarkan perkembangan ini batas fisik

antar negara menjadi kabur, hubungan inter personal di berbagai belahan bumi menjadi instan dan langsung, seolah tanpa batas dan membawa gaya hidup (*life style*) yang baru. Perkembangan teknologi internet yang terlampau pesat memunculkan berbagai media jejaring sosial yang beragam. Sebuah website yang “kerjanya” melakukan monitoring dan menganalisis perkembangan social media di seluruh dunia mencatat bahwa Indonesia berada pada rangking ke-empat dunia sebagai pengguna Facebook. Posisi ini berada di bawah Amerika Serikat, India dan Brazil (<http://www.socialbakers.com/facebook-statistics>)

Internetworldstats.com mencatat dalam data statistiknya bahwa pengguna Facebook di Indonesia berjumlah 78 juta, jumlah ini berbanding lurus dengan pengguna internet di Indonesia, artinya hampir 100 persen pengguna internet di Indonesia mempunyai akun media sosial misalnya Facebook. (<http://inet.detik.com/read/2013/06/05/120442/2265355/398/7-fakta-mengagetkan-tentang-facebook>).

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *PeerReach*, Indonesia menempati peringkat ke-3 dunia pengguna Twitter setelah Amerika Serikat dan Jepang. Jumlah pengguna Twitter sendiri pada tahun 2015 berada pada kisaran 50 juta pengguna atau sebanyak 20 persen dari total populasi penduduk Indonesia.

Ketika pemerintahan Jokowi-JK merilis Kabinet Kerja pada akhir Oktober 2014, publik tidak hanya melihat profil para menteri di atas kertas saja, namun publik juga mengintip profil para menteri melalui aktivitasnya di media Twitter. Sebanyak 21 menteri dari total 34 menteri yang diumumkan oleh Presiden mempunyai akun twitter. Fenomena saat ini

Adalah merupakan sebuah hal yang wajar kita temukan para pejabat publik menyebarkan konten sosialisasi terkait kebijakan publik tertentu, melakukan klarifikasi hingga melakukan update tentang kinerja serta capaian yang dilakukan unit kerjanya melalui media Twitter. Pun demikian dengan Presiden Jokowi yang sering menyampaikan informasinya melalui media ini. Terakhir Presiden Jokowi tanggal 15 April 2016 mentweet : “Ada 2 hal yg diwariskan ke anak cucu kita: ilmu pengetahuan dan kelestarian alam. Banyak belajar dan cintai alam –Jkw”. Para awak media juga kerap menjadikan tweet-tweet semacam ini sebagai sumber berita, menjadikannya terdiseminasi semakin luas termasuk kepada kalangan yang bukan merupakan pengguna Twitter. Bahkan Koran Rakyat Merdeka menjadikan kumpulan tweet dari para tokoh di Indonesia sebagai sumber berita dan menempatkannya di halaman pertama. Di sisi masyarakat, situasi ini membuat mereka dapat lebih mudah terhubung dengan para pejabat publik yang bekerja untuk hajat hidup orang banyak. Kehadiran media sosial tidak bisa disangkal telah turut memperkaya proses politik dan pengambilan kebijakan publik kita. Dengan cara yang murah dan efektif, efisien serta membuatnya semakin transparan.



Gambar oleh : Google

Dibelahan bumi yang lain yaitu Islandia, Facebook dimanfaatkan untuk menulis ulang konstitusi negaranya. Pemerintah Islandia melakukan beberapa perubahan dan mem-publish-nya melalui Facebook dengan tujuan agar penduduk dapat langsung memberikan saran, kritik dan pendapatnya untuk perubahan konstitusi. Langkah serupa sebelumnya pernah juga dilakukan di negara Denmark (<http://inet.detik.com/read/2013/06/05/120442/226535/5/398/7-fakta-mengagetkan-tentang-facebook>).

Tidak hanya sisi positif, banyak juga aspek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan jejaring sosial. Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus-kasus pemerkosaan akibat perkenalan yang dilakukan melalui Facebook. Sebuah survey yang dilakukan Divorce Online, yaitu firma hukum di Inggris mengungkapkan bahwa sepertiga atau 33% faktor penyebab perceraian di negara kerajaan tersebut adalah Facebook. Tim peneliti menemukan bahwa penggunaan Facebook meningkatkan rasa cemburu terhadap pasangan. Menghabiskan waktu untuk online pada situs jejaring sosial dan melihat pasangannya, maka tingkat kecurigaannya akan menjadi sangat tinggi. (<http://www.hasbihtc.com/2012/04/10-dampak-negatif-facebook-dalam.html>)



Gambar oleh : Google

Sebuah hasil penelitian yang dilansir oleh Sudhir Vekantesh, profesor sosiologi di *Columbia University* menyebutkan bahwa sekitar 83% dari mereka yang berkecimpung di dunia prostitusi di Amerika Serikat memiliki halaman Facebook. Sudhir mengatakan Facebook telah menjadi alternatif yang menarik bagi kalangan prostitusi untuk menjangkau klien. Di Indonesia sendiri pihak kepolisian sudah banyak mengungkap kasus dan praktek prostitusi melalui media jejaring sosial. Salah satu kejadian yang cukup heboh adalah kasus pembunuhan seorang PSK di kamar kost nya di wilayah Tebet oleh pelanggannya yang baru mencoba jasa prostitusi online melalui Twitter. Kasus yang tidak kalah heboh adalah mencuatnya skandal prostitusi online yang menyeret beberapa artis ternama tanah air pada pertengahan tahun 2015.

Di tengah-tengah dinamika dan pesatnya kemajuan globalisasi informasi yang telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, serta telah melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, Indonesia baru mempunyai regulasi mengenai ini melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam salah satu pertimbangannya huruf (f) tertulis : “bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.”

Beberapa pengamat mengatakan bahwa UU ITE tidak merasa cukup efektif serta masih banyak hal yang dirasa kurang dalam menghadapi fenomena jejaring sosial pada khususnya serta teknologi informasi pada umumnya. Namun demikian, adanya UU ITE merupakan sebuah bentuk respon dan langkah awal pemerintah untuk melindungi masyarakatnya dari penyalahgunaan internet, yang dapat berimplikasi pada keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.****

Kembali Ke Sekolah Tanpa "Post Holiday Syndrome".

FIRST DAY BACK TO SCHOOL
FROM DIFFERENT POINTS OF VIEW



Gambar oleh : Google

Oleh: Eka Rosilawati, S.Sos

Tidak terasa liburan sekolah akan berakhir. Beberapa teman saya mengajak keluarganya berlibur ke berbagai tempat wisata baik di dalam maupun luar kota. Ada pula yang mengisinya dengan kegiatan sehari-hari, misalnya menginap di rumah nenek, menghabiskan waktu beristirahat di rumah, menonton tv, lebih banyak waktu bermain untuk anak-anak, dan sebagainya. Andapun pasti punya kegiatan pengisi liburan tersendiri bukan?

Saat liburan, anak-anak berkesempatan keluar dari rutinitas bersekolah. Artinya mereka tidak harus bangun pagi, belajar dengan intensitas tinggi, hingga mengerjakan PR. Liburan memang diperlukan oleh anak-anak untuk menyegarkan pikiran setelah musim ujian. Bahkan dulu saat masih sekolah saya merasa bahwa liburan adalah hadiah (*reward*) untuk kita setelah belajar keras dalam waktu yang panjang. Maka wajar jika saat liburan, aturan dan tuntutan kepada anak tidak seketat saat bersekolah.

Saking nikmatinya, kadang beberapa anak enggan mengakhiri masa liburannya. Saat sudah waktunya kembali ke sekolah mereka malas-malasan bangun pagi, masih ingin menonton acara tv favorit, pura-pura sakit perut supaya masih bisa di rumah, hingga menolak untuk sekolah. Nah, kondisi ini ada istilahnya, yaitu *post holiday syndrome*.

Sebetulnya *post holiday syndrome* bisa dicegah dengan memberi pemahaman kepada anak tentang liburan sejak awal. Bisa saja kita sampaikan bahwa liburan adalah saatnya untuk melakukan hal lain di luar sekolah, namun waktunya terbatas dan setelahnya anak akan kembali bersekolah. Dengan demikian, sudah tertanam dalam pikiran anak bahwa liburan bersifat sementara dan kegiatan pokoknya adalah bersekolah.

Menyusun agenda liburan yang jelas juga dapat membantu anak untuk tetap terorganisir selama liburan. Bisa lebih santai dan tidak terikat aturan ketat bukan berarti anak bisa sesukanya melakukan apapun. Sebagai contoh, jika anak sudah tahu bahwa hari pertama agendanya adalah berenang, lalu hari kedua ke rumah saudara, dilanjutkan hari ketiga berjalan-jalan ke taman kota, maka ia dapat merencanakan jadwal hariannya dengan lebih baik. Misalnya, ia tahu karena akan berangkat pagi-pagi keesokan harinya, maka ia tidak akan tidur terlalu malam atau ia bisa mengurangi waktu menonton tv nya dan menggantinya dengan kegiatan *packing* atau menyiapkan pakaian yang akan dibawa jalan-jalan besok. Dengan tetap menetapkan struktur dan jadwal, anak akan lebih mudah merencanakan perilakunya dan mengatur dirinya tanpa merasa terlalu dikontrol.

Tentu kemampuan persuasif kita sebagai orang tua sangat diperlukan. Coba ciptakan suasana riang di pagi hari mulai dari saat membangunkan anak, mengajak anak untuk mandi dan bersiap-siap, hingga mengantarkan anak ke sekolah. Tunjukkan antusiasme kita dan ceritakan hal-hal menyenangkan yang dapat anak temukan di sekolah.

Tentu kita ingin sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak, bukan sekedar untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan. Maka ada baiknya kita sering menunjukkan sisi positif dari sekolah kepada anak dan memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat membuat mereka merasa nyaman maupun tidak nyaman saat bersekolah.****
(Sumber : *childrencafe.com*)

GALERI FOTO



Deputi Bid. Polstra Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus S, MM, MH dan Anjak Bid. Renkon Ekonomi Kedepuitian Polstra Kolonel Lek. Dr. Arwin D.W. Sumari, ST, MT dalam kunjungannya ke Singapura pada tanggal 12-14 April 2016.



Deputi Bid. Pengembangan Marsda TNI Sugihardjo, SE, dan Bandep Urs. Hankam Kedepuitian Pengembangan Brigjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si dalam kunjungannya ke Singapura pada tanggal 26-28 April 2016.



Sahli Bid. Ekonomi Irjen Pol. Drs. Bambang Hermanu, SH, MM, Sahli Bid. Iptek Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng, Sahli Bid. Hukum Dr. Mohammad Ghazalie dalam kunjungannya ke Singapura pada tanggal 28-30 April 2016.



Deputi Bid. Jiandra Laksda TNI Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH, Bandep Urs. Lingstranas Kedepuitian Jiandra Laksma TNI Eko Purwanto dan Kepala Biro Umum Setjen Wantannas Marsma TNI Lukas Pamardi, SH, MM dalam kunjungannya ke Singapura pada tanggal 2-4 Mei 2016.



Deputi Bid. Sisnas Mayjen TNI Dr. Drs. TSL. Toruan, MM, D.SS dan Bandep Urs. Lingpemneg Kedepuitian Sisnas Brigjen TNI Agus Suharto, S.IP, MM dalam kunjungannya ke Singapura pada tanggal 11-13 Mei 2016.

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

